

Kritik Budaya Akademik Sekolah: Tinjauan Kritis atas Pemikiran Paulo Freire & Neil Postman tentang Pendidikan Formal yang Demokratis

Maulana Malik Ibrahim

*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Jakarta*
Mmi1261298@gmail.com

Berliana Dian Permatasari

*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Jakarta*
berliana22.bs@gmail.com

Achmad Robi Afriliahadi

*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Jakarta*
achmadrobiafriliahadi@gmail.com

Muhammad Japar

*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Jakarta*
mjapar@unjac.id

Yuyus Kardiman

*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Jakarta*
yuyuskardiman.ppknunj.@gmail.com

Abstrak- Penelitian ini membahas mengenai kritik budaya akademik sekolah tentang pendidikan formal yang demokratis. Pendidikan formal (re: sekolah) yang mensyaratkan sebuah hubungan relasi guru-peserta didik perlu dikritisi secara mendalam melalui tinjauan kritis pemikiran Paulo Freire dan Neil Postman. Domestikasi yang terjadi antara guru-peserta didik menjadi sumber kritik yang disasar oleh pendidikan kritis. Konteks ini berlaku bahwa pendidikan seharusnya lebih mengembangkan nilai-nilai kebebasan dan kritisisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur atau pustaka (*literature review*) dengan mengelompokkan buku, jurnal, hingga laporan akademis. Analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif melalui tahapan *open coding* untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, dilanjutkan dengan *axial coding* untuk mengelompokkan konsep ke dalam kategori tematik, serta *selective coding* untuk merumuskan tema inti yang merepresentasikan kritik budaya akademik sekolah. Hal ini dilakukan untuk memilah pemikiran-pemikiran yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paulo Freire memiliki kritik budaya akademik sekolah sebagai alternatif gagasan pendidikan formal yang demokratis, meliputi: a). Perbaikan relasi guru-peserta didik lewat orientasi dialogis; b). Penggunaan *problem-posing education* (metode hadap-masalah). Sementara itu, Neil Postman menekankan kritik terhadap hubungan guru-peserta didik yang tidak terbuka terhadap kebaruan teoretis, dengan menawarkan: a). Re-demokratisasi ruang kelas; b). Pendekatan metode proyek edukasi guru-peserta didik.

Kata Kunci: Pendidikan Formal; Peserta Didik; Kritis; Kebebasan.

I. PENDAHULUAN

Konstruksi makna “kritik” seringkali dipahami sebagai upaya destruktif terhadap suatu objek, padahal kritik merupakan bagian

esensial dalam proses dekonstruksi pemikiran untuk perbaikan yang lebih komprehensif (Nuryatno, 2017). Dalam konteks pendidikan, kritik menjadi instrumen penting untuk menata

ulang praktik dan budaya akademik di sekolah. Namun demikian, praktik anti-kritik masih kerap ditemukan, terutama dalam relasi guru dan peserta didik yang cenderung bersifat dominatif (Freire, 1970; Freire & Macedo, 1987). Anggapan bahwa guru adalah pusat pengetahuan dan selalu benar masih mengakar, sehingga peserta didik diposisikan sebagai objek yang dibentuk, bukan subjek yang mengembangkan pemikirannya sendiri (Postman & Weingartner, 1971; Postman, 2024). Kondisi ini menjadi persoalan konvensional dalam pendidikan di Indonesia.

Selain persoalan relasi di ruang kelas, tantangan pendidikan juga muncul dari kebijakan publik. Salah satunya adalah kebijakan “pendidikan barak militer” yang dicetuskan oleh Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat (2024–2029), yang menimbulkan pro dan kontra. Pendekatan militeristik dalam kebijakan ini dinilai menekankan kepatuhan komando dan berpotensi mengabaikan substansi pendidikan yang membebaskan (Freire, 1970; Postman & Weingartner, 1971; Kincheloe, 2005; Zhuang, 2022). Data menunjukkan bahwa kebijakan ini menasar peserta didik dari jenjang SMP hingga SMK dengan berbagai latar belakang permasalahan, dengan jumlah mencapai 272 peserta didik sejak diberlakukan pada 1 Mei 2025. Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi peran relasi pedagogis antara guru dan peserta didik, tetapi juga berpotensi menghambat demokratisasi ruang kelas.

Dalam perspektif pendidikan kritis, kondisi tersebut bertentangan dengan gagasan Paulo Freire dan Neil Postman yang memandang pendidikan sebagai alat pembebasan. Freire menekankan pentingnya kesadaran kritis melalui dialog dan metode problem-posing untuk mendorong peserta didik membangun pengetahuannya secara mandiri (Mones, Masitoh, & Nursalim, 2022). Sementara itu, Postman mengkritik pendekatan konservatif dalam pendidikan dan menawarkan metode proyek edukasi sebagai upaya mengembangkan kreativitas serta makna pembelajaran (Postman & Weingartner, 1971; Aziz & Majid, 2022; Postman, 2024). Keduanya menegaskan bahwa pendidikan demokratis harus dibangun

melalui interaksi aktif antara guru dan peserta didik guna menumbuhkan kesadaran kritis.

Dengan demikian, permasalahan kebijakan dan praktik pendidikan tersebut dapat dijadikan titik tolak untuk mengkaji kembali budaya akademik sekolah dalam mewujudkan pendidikan formal yang demokratis. Diperlukan kerangka berpikir alternatif yang mampu mendorong terciptanya ruang kelas yang dialogis, humanis, dan berorientasi pada pengembangan kebebasan berpikir peserta didik. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kritik budaya akademik sekolah dapat dikonstruksi melalui pemikiran Freire dan Postman, dengan menempatkan sekolah sebagai arena demokratis yang bebas dari praktik domestikasi terhadap peserta didik.

II. METODE PENELITIAN

Dalam proses pemilihan literatur, penelitian ini menetapkan kriteria seleksi yang sistematis untuk menjamin kualitas dan relevansi sumber. Literatur yang digunakan harus memiliki keterkaitan langsung dengan pemikiran Paulo Freire dan Neil Postman, khususnya yang membahas pedagogi kritis, pendidikan demokratis, serta kritik terhadap budaya akademik sekolah. Sumber yang dipilih mencakup karya primer berupa buku asli kedua tokoh, serta sumber sekunder seperti artikel jurnal ilmiah bereputasi, prosiding, dan laporan akademik yang relevan. Untuk menjaga aktualitas, literatur pendukung diprioritaskan berasal dari publikasi dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, tanpa mengabaikan karya klasik yang menjadi rujukan utama. Selain itu, literatur yang digunakan harus memiliki kredibilitas akademik yang jelas, seperti terindeks dalam basis data ilmiah atau diterbitkan oleh penerbit terpercaya, serta tersedia secara lengkap untuk memungkinkan analisis yang komprehensif (Zed, 2004).

Sementara itu, teknik analisis teks dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif. Proses analisis diawali dengan tahap pengkodean awal (open coding) untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam teks, seperti dialogis, pendidikan gaya bank, re-demokratisasi, dan proyek edukasi. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan

kode (*axial coding*) ke dalam kategori yang lebih luas, seperti relasi guru–peserta didik, kritik budaya akademik, dan konsep pendidikan demokratis. Tahap berikutnya adalah penarikan tema utama (*selective coding*) untuk menemukan pola pemikiran yang mendasari gagasan kedua tokoh. Analisis juga dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara pemikiran Paulo Freire dan Neil Postman. Pada tahap akhir, dilakukan interpretasi kritis dengan mengaitkan temuan terhadap konteks pendidikan kontemporer, serta validasi data melalui pembacaan ulang dan perbandingan antar sumber guna meminimalkan bias dan meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan barak militer merupakan sebuah anomali dalam dunia pendidikan, serta sebuah diskursus baru di Indonesia. Pendidikan tersebut menggunakan pendekatan militeristik dengan tujuan untuk membentuk kedisiplinan dan kepatuhan lewat komando yang diberikan oleh seorang instruktur/komandan (Patria & Arief, 2003). Hal ini, memberikan gambaran secara umum bahwa pendidikan barak militer memiliki sifat memaksa dan memberikan rasa takut. Persinggungan ini dapat dilihat secara berlainan serta berbanding terbalik dari esensi pendidikan formal (Yulianto, 2017). Pendidikan formal yang diberlakukan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan peserta didik dalam mengembangkan kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta berpikir kritis sesuai dengan keterampilan abad ke-21.

Secara esensial, pendidikan formal—khususnya sekolah—harusnya menekankan pada kesadaran atas praktik-praktik kebebasan. Di sekolah, kesadaran tersebut hanya dapat dicapai dengan jalan kesadaran satu sama lain dan tanpa paksaan maupun dominasi. Namun, menurut Ivan Illich (1982) dalam kritiknya terhadap sekolah atau “*deschooling society*” memandang bahwa pendidikan formal memiliki kesan yang dianggap sebagai penghambat perkembangan individu,

kreativitas, serta seringkali memaksakan standardisasi. Anggapan ini jelas memberikan preseden negatif terhadap sekolah berkaitan dengan pembentukan kesadaran. Meskipun begitu, sekolah masih dianggap perlu diadakan, namun mengembangkan peran serta fungsi sekolah yang bukan hanya terbatas pada konsepsi “*schooling*”—penekanan pada pengembangan intelegensia, melainkan juga menekankan pada aspek pengembangan emosional (Kwirinus, Pandor, & Yuniarto, 2024; Nur, 2024).

Kebijakan mengirim peserta didik ke barak militer, juga dapat dilihat dari analisis Foucault (1977) mengenai konstruk panopticon dan *disciplinary power*. Dua konsep tersebut menjelaskan bahwa kesadaran dan kepatuhan dibentuk melalui ruang yang sempit menggunakan dominasi dan domestikasi. Namun, dengan hal tersebut kepatuhan akan terpengaruh dengan sendirinya. Disiplin digunakan untuk membentuk kepatuhan massal di dalam sekolah, bukan berpikiran bebas. Dari cara berpikir Foucault dapat disimpulkan sebuah penekanan terhadap pendisiplinan lewat pengawasan-pengawasan yang ketat. Namun, teori tersebut sangat bertentangan dengan mazhab pendidikan kritis yang akan dibawakan oleh Freire dan Postman.

Kritik budaya akademik sekolah seringkali menasar pada peranan guru yang dinilai tidak memberikan ruang-ruang demokratis di dalam kelas, sehingga pendidikan barak militer diperlukan. Kritik ini disampaikan oleh Freire dan Postman sebagai pemeliharaan budaya pengasingan diri peserta didik dari realitas kehidupannya (Freire, 1970). Namun, hal tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan pendekatan – pendekatan pembelajaran yang filosofis dan dekat dengan realitas peserta didik (Freire & Macedo, 1987). Dibandingkan pendidikan barak militer yang kaku, sekolah masih menawarkan semangat egaliter dalam diri setiap peserta didik.

Dalam konteks kritis, Paulo Freire dan Neil Postman memberikan alternatif gagasan atas kritik budaya akademik sekolah. Ia akan memberikan gambaran pendidikan formal yang demokratis serta metode yang perlu diterapkan. Alih-alih mengirim peserta didik dalam pendidikan barak militer, pemerintah perlu

mendekonstruksi pemikiran tersebut dengan pendidikan yang lebih demokratis.

Pemikiran Paulo Freire: Kritik atas Budaya Akademik Sekolah

Kompleksitas pemikiran Freire dapat dilihat dari banyak karyanya yang dengan presisi menjelaskan bahwa hakikat pendidikan ialah menjadi alat pembebasan manusia. Pembebasan yang dimaksud dalam teori pendidikan kaum tertindas ialah membongkar pengalaman politik budaya yang ada di Brazil, dan dapat dikaitkan dengan fenomena kontemporer yang ada di Indonesia (Nuryatno, 2017). Dalam mengkritik budaya akademik sekolah mengenai pendidikan formal yang demokratis, setidaknya Freire membahas dua hal penting, diantaranya ialah: a). Perbaikan relasi guru-peserta didik lewat orientasi dialogis, b). Penggunaan metode *problem-posing education* (metode hadap-masalah) (Freire, 1970; Freire & Macedo, 1987; Sudirman, 2019).

Pendekatan pendidikan kritis Freire lahir karena kemiskinan dan kelaparan yang menerjang Brazil, padahal di negara tersebut memiliki sumber daya alam melimpah dan sangat kaya. Rasa lapar sebagai konstruksi sosial tersebut yang hendak dilawan dan dikonstruksi sebagai solidaritas masyarakat (Freire & Macedo, 1987). Freire membuka mata dunia yang mengalami segregasi atas kehendak manipulatif yang diciptakan oleh sistem politik. Sistem tersebut menghasilkan budaya diam selama puluhan tahun, di mana masyarakat tidak berani menyuarakan kritisisme atas keadaannya. Bagi Freire keseluruhan sistem pendidikan formal—sekolah- menjadi alat utama bagi terbentuknya budaya diam tersebut (Sudirman, 2019).

Gerald Graff (2003) menjelaskan situasi yang dijelaskan Freire sebagai hasil pedagogis kurang sempurna yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Karena proses-hasil pendidikan yang telah ditentukan oleh pemegang otoritas/kuasa. Seperti yang disampaikan Freire, seharusnya hasil pedagogis akan membuka persepsi kritis dunia yang intersubjektif. Pandangan ini sejalan dengan Gajo Petrovic (dalam Freire, 1970) yang menyatakan “hasil pedagogis memiliki

standar keberhasilan apabila seseorang mampu mengubah dunianya dan dirinya melalui peningkatan kadar kebebasan pribadi”.

Dari abstraksi di atas turut menjelaskan permasalahan kontemporer dalam konteks pendidikan di Indonesia. Guru seringkali dianggap sebagai “pusat ilmu pengetahuan” dan “selalu benar”, yang menyebabkan berhentinya ruang-ruang dialog yang demokratis. Peserta didik dianalogikan sebagai objek yang dapat dibentuk kesadarannya. Gaya pendidikan yang hanya untuk membentuk kesadaran peserta didik disebut oleh Freire sebagai *Bank Education* atau pendidikan gaya bank, di mana sekolah melalui guru melakukan indoktrinasi dan merampas kebebasan berpikir (Nugraha, Wibowo, & Hendrawan, 2024).

Dalam menjelaskan pandangan Freire untuk memberikan gambaran pendidikan formal yang demokratis, cara-cara tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Perbaikan relasi guru-peserta didik lewat orientasi dialogis

Salah satu hal yang paling penting dalam pendidikan adalah peran relasi guru-peserta didik. Hal ini memengaruhi keseluruhan sistem pembelajaran berkaitan dengan metode, bahan ajar, evaluasi, hingga refleksi. Perbaikan relasi seharusnya tidak hanya dilakukan sebagai formalisme pendidikan, namun perlu dilakukan secara substantif dan menyentuh akar permasalahan (Aziz & Majid, 2022). Freire mengevaluasi dan menciptakan model orientasi dialogis untuk mendorong manusia—dalam konteks pendidikan disebut peserta didik—agar lebih komunikatif dan kritis.

Orientasi dialogis diciptakan sebagai kritik atas penerapan pendidikan gaya bank yang hanya mengeksploitasi peserta didik, namun tidak mengembangkan langkah maju kebebasan berpikir. Dari pemikiran ini, bukan hanya guru yang dituntut untuk mengembangkan model orientasi dialogis. Namun, peserta didik memiliki peran yang sama signifikannya dengan guru untuk menjadi subjek pendidikan itu sendiri—diminta untuk aktif, komunikatif, dan kritis. Freire tidak pernah memberikan panduan bagaimana seorang guru-peserta didik harus menerapkan orientasi dialogis di dalam kelas.

Karena ia percaya bahwa setiap ruang kelas memiliki perbedaan dan konteks masing-masing yang unik (Pongoh, Lumapow, Lengkong, Rotty, & Tuerah, 2022).

Di Indonesia sendiri, orientasi dialogis antara guru-peserta didik sulit tercapai karena durasi beban mata pelajaran lebih dari 1.000 jam/tahun. Sedangkan jam pelajaran yang berlangsung di negara-negara Asia-Pasifik hanya berkisar 500-900 jam/tahun. Bagi Giroux (1993) beban ini hanya menekankan pada penyelesaian kepentingan-kepentingan pragmatis, yaitu guru hanya perlu menyampaikan materi (*transfer of knowledge*), tanpa perlu merasa menyelesaikan permasalahan nilai dalam kehidupan (*transformation of value*). Ini yang menyebabkan peserta didik memiliki perasaan bahwa sekolah kurang memiliki makna penting dalam kehidupan. Mayoritas guru hanya menggunakan metode sederhana, seperti ceramah di depan kelas, tanpa adanya dialog yang dilakukan dua arah (Nuryatno, 2017). Padahal, menurut Freire teori tanpa praktik hanya akan menghasilkan verbalisme dan intelektual murni, sebaliknya praktik tanpa teori hanya menghasilkan tindakan-tindakan praksis tanpa dasar; keduanya perlu berdampingan satu sama lain .

Selain itu, kepentingan pragmatis tersebut menumbuhkan kesadaran naif yang tidak berbasis pada kebutuhan dan realitas kehidupan (Freire, 1970; Kwirinus, Pandor, & Yuniarto, 2024). Misalnya, corak pendidikan Indonesia yang cenderung satu arah, membuat tidak terjadinya dialog demokratis dalam ruang kelas, sehingga ide/gagasan peserta didik tidak muncul sebagai antitesis pikiran dari guru. Ini lah penyebab dari gagalnya sistem pendidikan formal yang tidak mampu mengembangkan budaya realitas. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan masyarakat yang berbasis agraris/pertanian. Namun, ironi dari fakta tersebut ialah bahwa Indonesia belum mampu mengembangkan budaya pertanian yang ideal, sehingga Indonesia perlu mengimpor keperluan-keperluan seperti beras, kedelai, bahkan garam dari luar negeri (Nuryatno, 2017).

Diperlukannya pendidikan formal yang berorientasi dialogis dan berpihak kepada realitas masyarakat agar peserta didik mampu melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Kritik yang lebih jelas disampaikan oleh Kincheloe (2005) bahwa kekeliruan terbesar dalam pendidikan ialah apabila hanya mengembangkan pikiran tradisional, tanpa menembus batasan-batasan kritisisme. Baginya, hal tersebut yang paling penting dalam pendidikan, daripada hanya mendengarkan guru secara satu arah, mencatat, dan mendengarkan. Peserta didik perlu untuk mengambil peran aktif seperti bertanya dan mengkritisi argumen dari guru (Nugraha, Wibowo, & Hendrawan, 2024)..

b. Penggunaan metode *problem-posing education* (metode hadap-masalah)

Setelah terjadi perbaikan relasi guru-peserta didik, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Freire ialah menggunakan metode hadap-masalah untuk menjadikan pendidikan formal lebih demokratis. Demokratisasi ruang kelas dapat terlihat apabila guru tidak menjadi subjek aktif dan peserta didik tidak menjadi objek pasif. Keduanya memiliki peranan aktif-kritis dalam ruang kelas, sehingga terbentuk pola komunikasi yang dialogis. Pola komunikasi dialogis berfungsi memenuhi kebebasan peserta didik dalam demokratisasi ruang kelas.

Demokratisasi ruang kelas seringkali dinihilkan oleh guru pada pendidikan formal yang bersifat konvensional. Selain itu, guru selalu menganggap bahwa pembelajaran yang dikembangkan sudah berbasis kurikulum dan telah dijalankan selama bertahun-tahun. Alhasil, gaya pendidikan yang dihasilkan hanya pendidikan yang tidak berbasiskan nilai (*academic values*). Nuryanto (2008) memotret permasalahan di atas sama persis seperti apa yang terjadi di Indonesia, ketika guru hanya menjelaskan teori-teori utopis dan tidak melahirkan kesadaran yang membebaskan peserta didik. Padahal, hakikat pendidikan ialah yang membebaskan pikiran, kreativitas, dan kritisisme. Kincheloe (2005) mengkritik pendidikan dengan gaya yang tidak berbasiskan nilai dan tidak melahirkan kesadaran. Menurutnya pendidikan seperti itu

memiliki pengertian yang anti-realitas dan tidak memahami permasalahan-permasalahan sosial peserta didik, yang akhirnya membuat peserta didik gagap di dalam masyarakat.

Metode hadap-masalah bagi Freire muncul untuk mengatasi kegagalan peserta didik untuk memahami realitas dan permasalahan sosial. Salah satu faktor kunci dalam menyelenggarakan metode hadap-masalah ialah mengganti terma mengajar (*teaching*) menjadi pembelajaran (*learning*). Terma tersebut menandakan penindasan simbolik yang terjadi antara relasi guru-peserta didik pada ruang kelas, yang menganggap bahwa peserta didik merupakan “gelas kosong” atau “kertas kosong”. Metode ini melihat realitas di luar dirinya sebagai pokok bahasan yang terintegrasi dengan basis lingkungan dan basis kemasyarakatan. Dua basis tersebut selalu terhubung dengan peserta didik dan tidak pernah terpisah sebagai satu kesatuan dalam mengangkat makna tujuan pendidikan (Freire, 1970; Yulianto, 2017; Zhuang, 2022).

Namun, dalam pengaplikasian metode hadap-masalah, Freire dikritik secara tajam oleh Michael W. Apple (dalam Freire & Macedo, 1987). Ia mengkritik cara berpikir metode tersebut secara abstrak dan bahkan pendidikan semacam itu dapat memperkuat struktur kekuasaan dan menindas struktur lainnya. Meskipun Paulo Freire menjelaskan mengenai pendidikan sebagai alat pembebasan, namun dalam status quo seringkali pendidikan mereproduksi ketidaksetaraan sosial. Maka dari itu, sangat penting untuk mengkritisi dan mengaplikasikan metode untuk pendidikan formal yang demokratis tersebut (Putera Semadi, 2018; Putera Semadi, 2022).

Dari kritik di atas, metode Paulo Freire dapat dikombinasikan dengan berbagai perubahan metode pendidikan baru sehingga menimbulkan kesan kesetaraan sosial. Merujuk pada penelitian yang dilakukan Farida & Putra (2021) bahwa pendidikan kritis dapat menambahkan kegiatan literasi kritis dalam membedah realitas sosial kontemporer, seperti

mengacaukan pandangan umum dengan kebebasan berpikir (*disrupting the common place*), memeriksa berbagai sudut pandang (*interrogating multiple viewpoints*), fokus pada isu-isu sosial-politik (*focusing on sociopolitical issues*), serta pengambilan tindakan dan mempromosikan keadilan sosial (*taking action and promoting social justice*).

Pemikiran Neil Postman: Kritik atas Budaya Akademik Sekolah

Pemikiran Neil Postman merupakan antitesis pedagogis konvensional yang erat kaitannya dengan sentralisasi pendidikan yang tersubjek—yaitu guru sebagai pusat pengetahuan. Pandangan ini mendorong Postman dan Weingartner (1971) mengkritik bahwa pendidikan harus menjadi kegiatan subversif, yang menantang status quo dan melahirkan pemikiran kritis. Sejalan dengan Freire, Postman menggali akar permasalahan pendidikan dari sentralisasi subjek dan budaya mempertahankan status quo yang mendomestikasi peserta didik.

Domestikasi peserta didik banyak disebabkan oleh pendidikan formal—sekolah yang tidak membuka diri serta menerima kebaruan teoretis. Sekolah seakan bertanggung jawab atas pelestarian teori-teori lama, sehingga kreativitas peserta didik dibatasi dengan status quo. Bagi Postman, alih-alih sekolah memberikan kebebasan berpikir kepada peserta didik, sekolah dianggap sebagai tempat yang melahirkan ketidakberdayaan. Argumen ini diperkuat dengan tesis Ivan Illich mengenai “*Deschooling Society*” dan Henry Giroux mengenai “*Hidden Curriculum*” yang keduanya menggugat pendidikan formal yang tidak relevan karena campur tangan kekuasaan. Lebih radikal lagi, Illich menginginkan masyarakat tanpa sekolah untuk membebaskan peserta didik dari belenggu domestikasi. Ditambah Giroux melancarkan sebuah serangan kepada institusi kekuasaan yang ikut campur dalam konteks pendidikan. Ia menyarankan bahwa guru tidak harus mengikuti kekuasaan (Re: Pemerintah) untuk membentuk peserta didik, kebebasan harus sepenuhnya diberikan kepada subjek pendidikan yaitu guru dan peserta didik sendiri (Siswadi, 2023).

Neil Postman (2024) sepenuhnya

memfokuskan kajiannya terhadap guru dan peserta didik yang dapat menciptakan pendidikan formal demokratis, di antaranya: a). Re-demokratisasi ruang kelas, b). Pendekatan proyek edukasi guru-peserta didik. Kedua gagasan tersebut digagas untuk melakukan redefinisi nilai-nilai terhadap sekolah. Meskipun Postman dikritik oleh banyak kalangan mengenai konsepsi pendekatan proyek edukasi yang cenderung konvensional, namun ia tidak tetap menjalankan teori tersebut sebagai basis tindakan yang mengarahkan pada kebebasan berpikir. Titik tumpu pada proyek tersebut ialah bahwa peserta didik memiliki kemerdekaan atas kreativitas dan pikiran mereka sendiri. Gagasan Neil Postman mengenai dua poin di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Re-demokratisasi ruang kelas

Postman menyoroti sistem pendidikan yang gagal karena terobsesi dengan teknologi, standar penilaian dan metode pembelajaran yang modern, namun mengenyampingkan esensi pendidikan. Pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter, memberikan makna, serta memberikan otonomi berpikir bagi peserta didik. Ia mengkritik modifikasi esensi pendidikan kontemporer yang melihat pendidikan sebagai alat untuk mencapai utilitas ekonomi, sehingga peserta didik hanya diarahkan untuk memenuhi pikirannya dengan pertanyaan “bagaimana cara lulus dari mata pelajaran ini?”. Konteks ini terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sebagai bagian dari hasil industrialisasi pendidikan (Yulianto, Musthafa, Gustine, 2024).

Henry Giroux (2011) juga mengkritik industrialisasi pendidikan sebagai suatu metode yang meruntuhkan kebebasan guru dan peserta didik. Guru dipaksa untuk mengerjakan dan menjelaskan seluruh hal yang diberikan dalam kurikulum sekolah, serta peserta didik diminta untuk menerimanya. Basis kritiknya bahkan menyebut guru dan peserta didik berada di dalam ruang penjara, karena mereka terlepas dari realitas sosial. Guru hanya

fokus untuk menciptakan manusia-manusia yang patuh dan hanya pandai dalam menyelesaikan tes dan tugas, sementara peserta didik dituntut untuk menyelesaikannya dan mendapatkan hasil yang tinggi. Alhasil, pendidikan hanya sebatas ruang kompetisi antarpeserta didik untuk saling menjatuhkan lawan daripada kerja sama yang berdasarkan pada solidaritas.

Re-demokratisasi ruang kelas menurut Postman diperlukan sebagai sarana ataupun alternatif dalam pengembangan pendidikan formal. Perubahan peran yang signifikan guru dan peserta didik secara ideal yang berpijak pada kesadaran kritis akan merubah arah dari esensi pendidikan dalam konteks industrialisasi. Re-demokratisasi ini didukung oleh John Martin Rich (1976) melalui pendapatnya yang mengatakan bahwa pendidikan formal tidak akan pernah berhasil menghasilkan peserta didik kritis apabila ruang kelas dipenuhi dengan tekanan, pengekangan, dan subversi. Sekali lagi hal ini menunjukkan kelebihan dari gagasan Postman mengenai sekolah sebagai aktivitas yang subversif.

Pada dasarnya semua peserta didik memiliki tanda tanya atas esensi pendidikan, yang membentuk atau membebaskan. Re-demokratisasi setidaknya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang merdeka dalam pendidikan. Penekanan ini digagas oleh Postman (2024) sebagai hal yang harus diberikan oleh guru dalam membantu memecahkan realitas sosial; setidaknya dengan cara berargumentasi, menemukan jawaban-jawaban praksis dalam kehidupan, dan membentuk pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Pendidikan formal yang demokratis perlu dibangun melalui semangat re-demokratisasi agar meninggalkan pemikiran usang, yaitu berupa industrialisasi pendidikan (Putera Semadi, 2022).

b. Pendekatan metode proyek edukasi guru-peserta didik

Selain gagasan re-demokratisasi ruang kelas, Postman (dalam Postman & Wingartner, 1971; Putera Semadi, 2022) membuat sebuah pendekatan pendidikan kritis bernama proyek edukasi guru-peserta

didik. Proyek ini merupakan sebuah gagasan kritis yang berangkat dari kebudayaan pendidikan Amerika dalam membantu peserta didik memahami narasi besar atau cerita budaya kehidupan masyarakat. Ia berpendapat bahwa sekolah tidak bisa hanya menjadi tempat melakukan transfer informasi atau keterampilan teknis. Melainkan pendidikan harus menawarkan narasi besar yang memberikan makna, identitas, dan tujuan hidup bagi peserta didik di sekolah. Tanpa narasi, pendidikan akan kehilangan esensi yang krusial.

Salah satu esensi pendidikan yang dapat dijelaskan dalam kritik Postman ialah pendidikan formal perlu membantu peserta didik untuk mengenali identitas individual dengan menyingkap narasi besar tersebut. Guru memiliki peran menekankan nilai-nilai kultural yang diciptakan bersama dalam lingkungan sekolah (Putera Semadi, 2018). Pada bagian lain, penekanan pendekatan proyek edukasi dapat dikenali dalam tanggung jawab dan kontribusi terhadap kehidupan sosial-kemasyarakatan. Guru perlu mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam konteks kehidupan sosial dan tidak terbatas hanya berada di sekolah. Guru juga dapat menerapkan model pembelajaran *problem based learning* (PBL) maupun *project based learning* (PjBL) untuk memberikan kebebasan pada peserta didik dalam menumbuhkan kreativitas.

Seringkali proyek edukasi guru-peserta didik dimaknai secara berbeda dalam realitasnya di sekolah. Penumpukan proyek dan tugas yang membebankan menjadi satu permasalahan tambahan dalam ruang kelas. Guru memberikan proyek yang banyak dan peserta didik diminta untuk menyelesaikannya. Justru, Postman menggugat sistem pendidikan yang memberikan proyek terlalu berlebihan, karena dapat mengekang kebebasan peserta didik dalam menjawab permasalahan dalam realitas sosial. Proyek edukasi ditujukan untuk membentuk peserta didik yang kritis, berpikir terbuka, aktif, dan reflektif terhadap isu-isu sosial-politik, dan budaya.

Dalam penjelasan akhirnya, Postman (dalam Putera Semadi, 2018) memberikan auto-kritik terhadap gagasannya sendiri yang melihat bahwa realitas teknologi yang berkembang secara pesat akan mampu menihilkan peran relasi guru-murid secara bersamaan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh tergantinya sifat dasar manusia, muncul sifat-sifat, persepsi-persepsi, dan tindakan-tindakan yang berorientasi pada budaya instan. Akhirnya, sekolah tidak mampu membendung arus tersebut, sehingga peran guru tergantikan dan peserta didik kehilangan moralitas, yang menurut Hackbrath (dalam Aziz & Majid, 2022) menjadi pembatas kebebasan manusia.

Tabel 1. Perbandingan Pendidikan Barak Militer, Paulo Freire, & Neil Postman

Aspek	Pendidikan Barak Militer	Paulo Freire	Neil Postman
<i>Relasi Guru-Peserta Didik</i>	Hierarkis, komando	Dialogis, setara	Demokratis, terbuka
<i>Pendekatan Pembelajaran</i>	Instruksi & disiplin	Problem-posing (Hadap-masalah)	Proyek edukasi
<i>Posisi Peserta Didik</i>	Objek pasif	Subjek aktif-kritis	Subjek aktif-reflektif
<i>Tujuan Pembelajaran</i>	Kepatuhan	Kesadaran kritis	Pemaknaan dan kreativitas
<i>Karakter Pendidikan</i>	Represif	Emansipatoris	Humanis-kritis

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kritik budaya akademik sekolah terhadap pendidikan formal yang demokratis,

sebagaimana dirumuskan oleh Paulo Freire dan Neil Postman, berangkat dari penolakan terhadap praktik pendidikan yang bersifat dominatif, indoktrinatif, dan menempatkan

peserta didik sebagai objek. Keduanya memandang bahwa budaya akademik sekolah yang tidak demokratis tercermin dalam relasi guru-peserta didik yang hierarkis serta tertutup terhadap dialog dan kebaruan pemikiran.

Dalam perspektif Freire, kritik tersebut diarahkan pada praktik *banking education* yang mengekang kebebasan berpikir peserta didik. Sebagai alternatif, Freire menawarkan orientasi dialogis dan metode *problem-posing education* untuk membangun kesadaran kritis serta menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Sementara itu, Postman mengkritik pendidikan yang terjebak dalam konservatisme dan kehilangan makna, dengan menawarkan re-demokratisasi ruang kelas serta pendekatan proyek edukasi yang mendorong kreativitas, refleksi, dan keterlibatan peserta didik dalam realitas sosial.

Meskipun memiliki latar belakang dan titik tekan yang berbeda, kedua pemikiran tersebut memiliki kesamaan fundamental, yaitu menempatkan pendidikan sebagai ruang pembebasan yang harus dibangun melalui relasi yang egaliter, dialogis, dan humanis. Dengan demikian, kritik budaya akademik sekolah menurut Freire dan Postman menegaskan bahwa pendidikan formal yang demokratis hanya dapat terwujud apabila sekolah mampu meninggalkan praktik-praktik domestikasi dan membuka ruang bagi pengembangan kesadaran kritis peserta didik.

Implikasinya, berbagai kebijakan dan praktik pendidikan yang bersifat represif—seperti pendekatan barak militer dalam pendidikan—tidak sejalan dengan prinsip pendidikan demokratis. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi budaya akademik sekolah yang berorientasi pada kebebasan berpikir, dialog, dan partisipasi aktif peserta didik sebagai inti dari pendidikan yang membebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A. A., & Majid, A. N. (2022). Kritik Budaya Moralitas Pendidikan Sekolah Perspektif Neil Postman dan Azyumardi Azra. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 5(1), 33-52.

Dale, J., & Margison. (2010). *Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation*. New York: Springer.

Farida, N., & Putra, K. D. (2021). Upaya Menumbuhkan Kemampuan Literasi Kritis oleh Berdikari Book. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 7(1), 51-64.

Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of The Oppressed*. London: The Continuum International Publishing Group Ltd.

Freire, P., & Macedo, D. P. (1987). *Literacy: Reading the Word and the World*. South Hadley: Bergin & Garvey Publisher.

Giroux, H. A. (1993). *Border Crossing: A Cultural Workers and the Politics of Education*. New York: Routledge.

Giroux, H. A. (2011). *On Critical Pedagogy*. London: Continuum Publishers.

Graff, G. (2003). *Clueless In Academe: How Schooling Obscures the Life of the Mind*. New Heaven: Yale University Press.

Illich, I. (1982). *Deschooling Society*. New York: Harper & Row Publishers.

Kincheloe, J. L. (2005). *Critical Pedagogy*. New York: Peter Lang.

Kwirinus, D., Pandor, P., & Yuniarto, P. (2024). Technology as a Means of Human Liberation in the Perspective of Herbert Marcuse. *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology*, 5(2), 72-80.

Mones, A. Y., Masitoh, S., & Nursalim, M. (2022). Merdeka Belajar: Sebuah Legitimasi terhadap Kebebasan dan Transformasi Pendidikan (Sebuah Tinjauan Pedagogi Kritis menurut Paulo Freire. *Jurnal Yaqzhan*, 8(2), 302-311.

Nugroho, A. E., Wibowo, D., & Hendrawan, B. (2024). Paulo Freire 's Critical Pedagogy Analysis of Educational Transformation. *Majority Science Journal*, 2(2), 220-228.

Nur, M. C. (2024). Educational Reconstruction: A Study of Paulo Freire's Thought. *ETDC: Indonesian Journal of Research and Educational Review*, 3(2), 13-21.

Nuryatno, M. A. (2008). *Mazhab Pendidikan Kritis*. Yogyakarta: Resist Book.

Nuryatno, M. A. (2017). Kritik Budaya Akademik di Pendidikan Tinggi. *The Journal of Society & Media*, 1(1), 35-42.

Patria, N., & Arief, A. (2003). *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Pongoh, D., Lumapow, H. R., Lengkong, J. S., Rotty, V. N., & Tuerah, I. J. (2022). Sumbangan Pemikiran Filsafat Pendidikan Paulo Freire Bagi Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia. *Media: Jurnal Filsafat dan Teknologi*, 3(1), 103-115.
- Postman, N. (2024). *The End of Education: Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah*. Yogyakarta: Octopus.
- Postman, N., & Weingartner, C. (1971). *Teaching As a Subversive Activity*. London: Delta Publishing.
- Putera Semadi, A. A. G. (2018). Pendidikan Kritis Berdimensi Ideologis Kultural. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 9(1), 1-8. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 13(2), 209-223.
- Putera Semadi, A. A. G. (2022). Paradigma Pendidikan Kritis dalam Dimensi Kesadaran Kritis dan Proses Dialogis Kritis.
- Rich, J. M. (1976). What is A School? *The Journal of Educational Thought*, 10(2), 119-125.
- Siswadi, G. A. (2023). Telaah atas Pemikiran Henry Armand Giroux tentang Pedagogi Kritis dan Relevansinya dengan Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia. *Maha Widya Bhuwan*, 6(1), 22-33.
- Sudirman, P. (2019). Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran (Tinjauan Paulo Freire). *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 4(2), 63-72.
- Tempo, T. (2025, Mei 6). 6 Kriteria Anak Nakal Dikirim ke Barak Militer. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Tim Redaksi Kompas. (2025, Mei 5). "Barak Militer untuk Siswa" Dinilai jadi Bukti Kegagalan Kemendikdasmen. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Tim Tempo. (2025, Mei 7). Cocokkah Barak Militer menjadi Tempat Pendidikan Anak? Lembang, Jawa Barat, Indonesia.
- Yulianto, S. W. (2017). Perbedaan dan Persinggungan Pedagogi Kritis dengan Berpikir Kritis. *Jurnal Biomatika*, 3(2), 1-7.
- Yuliato, S. M., Musthafa, B., & Gustine, G. G. (2024). Practicing Critical Pedagogy for Higher Education in EFL Context: Benefits and Challenges. *Journal of English Language Teaching in Indonesia*, 12(2), 189-204.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Zhuang, Y. (2022). On the Educational Value of Technology in the 21st Century. *International Journal of Management and Education in Human Development*, 1(2), 165-168.